

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban tindak pidana merupakan salah satu unsur dari sebuah kejahatan, korban bisa dikategorikan kedalam dua bentuk yakni korban individu maupun korban secara kolektif. korban dalam sebuah kejahatan merupakan pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang lemah. Korban tindak pidana sendiri menurut UU No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban Jo UU No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. menyatakan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” Menurut Arif Gosita korban memiliki pengertian. “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingann diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.¹

Dari pengertian yang diberikan oleh UU perlindungan saksi dan korban dan definisi dari Arif Gosita tersebut, memiliki pengertian bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dari adanya suatu tindak pidana. Dari dasar tersebut dapat dikatakan bahwa korban memiliki kepentingan untuk mencari keadilan terhadap kerugian yang dialaminya dan korban sebenarnya memiliki posisi sentral dalam

¹ Arif Gosita, 1993. *Maslah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm 65

sistem peradilan pidana dan merupakan nadi dari sistem peradilan pidana. Atas penjabaran Dari pengertian korban tersebut, terdapat suatu pengelompokan korban antara lain yakni korban kejahatan lingkungan, korban kejahatan politik, korban kejahatan nyawa, korban kejahatan harta benda dsb. Definisi korban sebagai pihak yang lemah dalam mata rantai kejahatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka selayaknya korban mendapat sebuah perlindungan dari berbagai ancaman dan kerugian hingga ketidakadilan.

Seiring berkembangnya negara modern lambat laun kepentingan korban untuk mendapat keadilan atas kerugian yang didapat atas tindakan kejahatan terhadap korban tindak pidana berangsur-angsur diambil alih oleh negara. Dalam sistem peradilan pidana, negara mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat emosional dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional.² Terhadap diambil alihnya kewenangan penuntutan oleh negara yang berimplikasi berubahnya sistem *privat prosecution* menjadi *public prosecution* maka negara harus melakukan upaya mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban, antara lain berdasarkan *argumen kontrak sosial*. Menurut argumen ini, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Peran

² Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam perspektif teoritik dan praktik*, Bandung. CV. Mandar maju. Hlm 166

jaksa penuntut umum dalam persidangan, melakukan penuntutan terhadap terdakwa atas perbuatan yang merugikan korban tindak pidana.³ Oleh karenanya, peran jaksa secara hakikat adalah mewakili korban tindak pidana, walaupun dalam undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa jaksa disebutkan sebagai wakil negara. Hal ini tidak terlepas dari pandangan konsep kejahatan yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan public yang dilandasi oleh pemikiran berbasis *retributive justice*.⁴

Membicarakan korban tindak pidana akan merujuk kepada dua jenis perlindungan yaitu hak pelayanan dan hak prosedural. Dalam model hak prosedural dimungkinkan peranan korban sangat aktif dalam setiap tingkat perkara. Sedangkan hak pelayanan (*service model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, atau upaya pengembalian kepada kondisi semula.⁵

Realita di lapangan keterwakilan korban oleh jaksa penuntut umum masih kurang menampakkan hasil yang memuaskan bagi keberadaan korban, hal itu dapat dilihat dalam *criminal justice system* yang dianut oleh Indonesia dengan menggunakan sistem hukum Eropa kontinental kedudukan korban tindak pidana yang diwakil oleh institusi negara yakni polisi dan jaksa dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan, hanya bersifat simbolik, dengan

³ Rena Yulia, Jurnal Mimbar Hukum. *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Hlm 35

⁴Retributive justice merupakan pandangan mengenai suatu kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap negara, maka negara harus melakukan suatu reaksi. Siswanto Sunarso, 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Sinar grafika. Hlm 43

⁵ *Op.cit.* Lillik Mulyadi, Hlm 408

kata lain penuntut umum tidak merasa mewakili korban di dalam persidangan.⁶ Terkadang korban yang secara aktif membantu kepolisian maupun kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya yakni membuat terang suatu perkara kejahatan setelah itu korban dilupakan. Sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri dengan upaya untuk memperjuangkan hak-hak terdakwa dan membelanya. Dengan demikian maka peranan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi hilang yang berimplikasi terhadap kesempatan korban untuk mencapai keadilan yang diinginkan menjadi sempit sehingga korban kejahatan dianggap sebagai pihak yang dilupakan dalam sistem. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya penerapan asas kesamaan di muka hukum yang masih abstrak.

Ketimpangan kedudukan terhadap korban tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas diperparah oleh aturan dalam hukum pidana formil Indonesia (KUHP). Yakni korban kurang mendapat pengakuan yang memadai, dan terlihat cenderung terjadi pengabaian, berbeda dengan pelaku tindak pidana, KUHP memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang sangat dominan. Hal tersebut tercermin di dalam beberapa asas yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang keseluruhan asas tersebut memberi perlindungan terhadap

⁶ Penulis mendapat kesimpulan seperti ini ketika sedang melaksanakan kegiatan magang di kejaksaan batu pada bulan februari 2017. Pada waktu itu penulis melakukan pembicaraan dengan salah satu jaksa yang menyatakan dalam hal melakukan penuntutan jaksa bertindak atas nama kepentingan masyarakat luas. Hal ini dapat penulis simpulkan sebagaimana dijelaskan bahwa secara hakikat korban diwakili oleh jaksa namun realitasnya hal tersebut hanya simbolis saja. Hal ini merupakan awal dari ketimpangan kedudukan korban dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

pelaku tindak pidana tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan haknya.⁷

Asas dalam KUHAP dalam penjelasannya hampir semua berorientasi kepada perlindungan kepada tersangka dan/atau terdakwa. KUHAP hanya memberikan korban kejahatan Hak dalam memperjuangkan kepentingannya, diatur di dalam pasal 98 dan 99 KUHAP melalui gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh korban sendiri dan mengajukan kepada pengadilan untuk selanjutnya menetapkan gugatan ganti kerugian tersebut. Gugatan ganti kerugian merupakan suatu upaya pembaharuan dari norma positive yang sebelumnya digunakan yakni HIR yang tidak mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban. Namun dengan hak yang diberikan kepada korban oleh KUHAP hal tersebut masih belum memberikan suatu keadilan terhadap korban dan belum efektifnya perlindungan terhadap korban tindak pidana karena kerugian yang dimaksud dalam KUHAP hanya sebatas kerugian materiil, padahal jika dikaji lebih dalam hubungan antara korban dan kejahatan adalah adanya pihak yang mengalami kerugian fisik, mental, ekonomi hingga harga diri dengan kata lain kerugian yang dialami bukan saja kerugian materiil namun kerugian immaterial yang tidak dapat diukur besarnya.

Peraturan yang kurang memihak kepada posisi korban tersebut juga terjadi pada UU perlindungan saksi dan korban yang merupakan *instrument* peraturan untuk melindungi korban belum maksimal penerapannya. Kurang memihaknya UU

⁷ Rena yulia, 2013. *Viktimologi, Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, Graha Ilmu. hlm 104

perlindungan saksi dan korban dapat diketahui melalui korban dalam mengajukan haknya yakni hak restitusi, masih membutuhkan adanya suatu survey terhadap korban dan masih memerlukan permohonan, dengan artian ada proses lain di luar proses yang dilakukan terhadap kerugian yang dialami korban. Sehingga masih memerlukan waktu dan tahapan yang tidak sederhana. Keberadaan LPSK disini dapat dikatakan pasif, yakni hanya menunggu permintaan hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran peraturan lembaga perlindungan saksi dan korban nomor 1 tahun 2010 tentang standar operasional prosedur (SOP) permohonan dan pelaksanaan restitusi. Kedudukan korban yang demikian mencerminkan bahwa korban tindak pidana kurang mendapat perhatian di dalam sistem peradilan pidana dan berimplikasi kepada tidak tercapainya hak untuk mendapat keadilan oleh korban.

Korban Tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku tindak pidana. Hal tersebut berimplikasi kepada korban ketika putusan pengadilan dijatuhkan, kondisi korban tidak diperhatikan padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia dan keadilan tidak hanya berlaku kepada pelaku kejahatan saja akan tetapi kepada korban.⁸ Salah satu contoh adanya suatu ketidakadilan terhadap korban yakni terjadi di Medan Sumatra utara dan Malang jawa timur seperti dilansir oleh media *medandailybisnis* dan *beritajatim.com*

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita Hlm. 24 dikutip dari Rena Yulia *victimologi. Op.cit.* 2013

Medan. Sidang putusan kasus penipuan dan penggelapan Rp 1,2 miliar dengan terdakwa Joko Haryono, di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Medan, berakhir ricuh, Kamis (4/9). Pasalnya, korban bernama Hastina tak puas dengan putusan majelis hakim yang diketuai Sherliwati karena majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun tanpa perintah penahanan. "Seharusnya ibu hakim memerintahkan ditahan. Terdakwa ini sudah menipu saya. Uang saya, Rp 1,2 miliar lenyap ditipunya. Dimana keadilan untuk saya Bu hakim, seharusnya terdakwa ini dipenjara," kata Hastina dengan suara kuat setelah mendengarkan putusan hakim⁹.

Malang. Rasa kecewa dan makian dari keluarga Nadya Bella Anggreani, mahasiswi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang (Unmuh) yang menjadi korban pembunuhan, tak bisa dibendung lagi. Pasca ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Arianta Era Winawan, memvonis pembunuh Bella dengan 20 tahun penjara, Selasa (31/1/2017) siang, amarah keluarga Bella pun tak terelakkan¹⁰.

Dari petikan surat kabar di atas diketahui bahwa sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia telah menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap korban tindak pidana. Korban tindak pidana yang telah kehilangan harta bendanya dan kehilangan jiwanya tidak menemukan keadilan terhadap kerugian yang dialami. Dari contoh tersebut jika dimaknai lebih mendalam bahwa hak dari korban untuk melakukan upaya hukum tertutup ketika jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya hukum, berbeda ketika terdakwa sebagai pelaku tindak pidana merasa putusan pengadilan tidak adil maka terdakwa bebas melakukan upaya hukum selama masih didalam koridor peraturan yang berlaku. hal tersebut terjadi karena peraturan tidak memberikan kesempatan serupa kepada korban. Selain itu dari contoh di atas tidak

⁹ <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/09/05/115680/tak-puas-putusan-hakim-korban-histeris> Akses Tgl 30-Maret-2017

¹⁰ http://beritajatim.com/hukum_kriminal/288848/pembunuh_bella_divonis_20_tahun_penjara,_keluarga_histeris.html Akses Tgl 30- Maret-2017

adanya ganti rugi atas uang yang hilang dalam putusan pengadilan menyebabkan belum tercapainya keadilan. Hal tersebut telah memperjelas bahwa kedudukan korban semakin tidak dipandang dan terkesan termarginalkan. Ketimpangan antara korban dan terdakwa akan penulis gambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Perbandingan kedudukan korban dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Jenis perlindungan	Korban	Terdakwa
Asas dalam KUHAP	Tidak ada asas yang tujuannya memberikan perlindungan kepada korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan 2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang 3. Orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di sidang pengadilan dianggap tidak bersalah 4. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

		<p>tanpa alasan yang berdasarkan undang-undangan atau karena salah tangkap atau salah orang wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi sejak tahap penyidikan</p> <p>5. Peradilan yang harus dilaksanakan secara cepat, adil, dan biaya murah serta bebas, jujur dan tidak memihak</p> <p>6. Setiap orang yang tersangkut masalah hukum harus wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum</p> <p>7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang dikenakan juga diberi tahu hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum</p> <p>8. Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa</p> <p>9. Sidang terbuka untuk umum</p> <p>10. Pengawasan</p>
--	--	--

		pelaksanaan putusan.
Upaya Hukum	Tidak mendapat kesempatan melakukan upaya hukum jika jaksa tidak melakukan	Mendapat kesempatan untuk melakukan upaya hukum Banding, kasasi, hingga peninjauan kembali
Ganti rugi	UU seperti Kuhp, Kuhap, hingga UU perlindungan saksi dan korban belum mengamanatkan penegak hukum secara aktif untuk memperjuangkan restitusi	Dapat mengajukan kompensasi dan rehabilitasi jika terjadi salah prosedural baik sendiri maupun melalui wakilnya yakni penasihat hukum..

Peran jaksa dalam mewakili korban hingga peraturan yang tidak mengakomodir korban dalam mencari keadilan terhadap adanya tindak pidana itu sendiri mengakibatkan tidak tercapainya amanat konstitusi yang mengisyaratkan bahwa perlu adanya perhatian terhadap *equality before the law* sebagaimana bunyi pasal 28D UUD NRI 1945 yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Secara konsep *equality before the law* menginginkan suatu kesamaan kedudukan setiap orang didepan hukum dengan tujuan adalah menciptakan keseimbangan dengan *goal* atau tujuan adalah menciptakan keadilan untuk menghadirkan kebahagiaan. Seperti konsep dari Jeremy bentham, tokoh aliran utilitarianisme yang mendasarkan fungsi hukum untuk mencapai tujuan kemanfaatan

terhadap manusia dalam konteks ini adalah korban tindak pidana.¹¹ asas *equality before the law* merupakan salah satu perwujudan dan konsekuensi dari Negara hukum (*rechtstaat*) dan suatu hal mutlak untuk diakui dan diterapkan dengan cara harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹² Dalam konteks posisi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana diperlukan penerapan asas yang demikian, untuk membentuk paradigma baru terhadap kedudukan korban tindak pidana dan menghadirkan keadilan bagi keberadaan korban tindak pidana sebagai pihak yang menderita atas adanya tindak pidana yang menimpanya.

Telah terjadi suatu permasalahan mengenai tidak tercapainya amanat konstitusi terhadap korban tindak pidana dengan tidak diberikannya perlindungan serta akses yang tidak seimbang oleh hukum positif sebagaimana hak yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Secara konstitusi Indonesia pasca amandemen ke-II, Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) sudah mulai diakui dengan salah satu amanatnya adalah tidak adanya diskriminasi terhadap para pihak di depan hukum dalam konteks ini para pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan. Terhadap permasalahan korban tindak pidana yang sedikit memiliki akses untuk menyampaikan keinginannya di dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga implikasinya adalah kedudukan yang tidak seimbang. Padahal secara konstitusi, mengingat pasal 28D (1) menginginkan adanya suatu kesamaan kedudukan di depan

¹¹ Rena Yulia. *Op.cit.*. Hlm 133

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

hukum. Hal ini tentu menjadi suatu *problem* bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam menghadapi persoalan ketimpangan yang berimplikasi terhadap ketidakadilan bagi korban tindak pidana. Mengingat posisi korban disini merupakan pihak yang mengalami kerugian baik materil maupun imateril. Negara harus mengambil peran dalam persoalan ini dalam rangka hukum yang akan berlaku pada masa mendatang (*ius constituendum*). Dalam Kajian HAM pada tingkat internasional dikenal doktrin tanggung jawab negara dalam hal pengakuan HAM. F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai “kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kemungkinan kerugian yang timbul.”¹³ dari doktrin tersebut terdapat suatu pengertian negara harus terlibat memberikan suatu kenyamanan kepada sebab suatu fenomena dalam hal ini belum tercapainya *equality* dalam penegakan hukum terhadap korban tindak pidana akibat tidak seimbangnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.

Belum terciptanya *equality before the law* yang merupakan amanat konstitusi terhadap korban tindak pidana merupakan akibat dari peraturan yang belum memberikan ruang bagi korban tindak pidana sehingga tidak memberikan jaminan keadilan bagi korban tindak pidana itu sendiri. Melihat kondisi dan realitas berlakunya peraturan yang tidak memihak kepada posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang termarginalkan dan melihat kultur budaya masyarakat Indonesia, maka seharusnya pemerintah harus bertindak responsif untuk

¹³ Rhona K.M. Smith, at, al 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII Yogyakarta. Hlm 71

menghadirkan pertanggung jawaban negara dalam kasus ini melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy*, dapat juga disebut sebagai politik hukum pidana. Salah satu konsep yang dirasa dapat menghadirkan keadilan yakni konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) bagi para pihak yang bermain didalam *criminal justice system*. konsep restorative justice, hampir sama dengan proses penyelesaian kejahatan dalam masyarakat adat yakni melalui musyawarah dengan ketentuan semisal pembayaran sejumlah barang atau semacamnya untuk tujuan mengurangi penderitaan bagi korban dan untuk mencari jalan tengah dan solusi terbaik dari permasalahan yang ada.¹⁴ Dalam konsep *restorative justice* ada empat unsur yang melaksanakan peran, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **KAJIAN YURIDIS KESAMAAN DIMUKA HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**. Guna mengetahui bagaimana kedudukan korban Tindak pidana dalam sistem peradilan pidana indonesia memperoleh keadilan dan bagaimana penegakan HAM bagi korban tindak pidana. serta menemukan solusi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dan hendak menjadi sorotan kajian yaitu :

¹⁴ dikutip dari Naskah akademik RUU KUHAP Hlm 18

1. Apakah sistem peradilan pidana Indonesia memberikan kesamaan dimuka hukum terhadap korban tindak pidana secara umum ?
2. Bagaimana konstruksi ideal terhadap perlindungan dan pengakuan kesamaan dimuka hukum untuk memberikan keadilan terhadap korban tindak pidana sehubungan dengan *ius constituendum* Sistem peradilan pidana Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penulisan penelitian hukum ini merupakan hal penting dan merupakan hal yang mendasari adanya penulisan ini dan sebagai solusi menjawab dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui posisi korban tindak pidana secara filosofis.
2. Mengetahui kedudukan dan peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Sebagai sarana menemukan solusi terhadap kebijakan hukum pidana (*ius constituendum*) dalam konteks korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis didalam penulisan penelitian hukum ini baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan membantu dalam pengembangan dan menambah wawasan terutama dalam hal korban kejahatan (*victimologi*) didalam sistem peradilan pidana

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa serta masyarakat dan menjadi refrensi terhadap permasalahan kedudukan korban didalam sistem peradilan pidana dan menjadi awal dari adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun refrensi bagi kalangan akademisi dalam hal perlindungan korban tindak pidana dalam hal memberikan keadilan bagi berbagai pihak.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma baru bagi penegak hukum tentang posisi korban tindak pidana/kejahatan yang sejatinya memerlukan sebuah pengakuan dan perlindungan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan didalam penyusunan penelitian hukum kali ini menggunakan pendekatan yuridis normatif , yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat¹⁵. Dalam penelitian kali ini penulis mencoba meneliti perundang-undangan, dengan didukung oleh literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian kali ini juga dilakukan dengan menggunakan konsep atau doktrin oleh para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Jenis Bahan Hukum/Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun media yang komperhensif.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang didapatkan dari ensiklopedia maupun kamus.

¹⁵ Sidik sunaryo, *Pedoman penulisan hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah malang*, UMM Press, 2012. Hlm 18

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu Undang-undang serta ditambah dengan analisa substansi undang-undang terkait.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini menggunakan metode penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur dalam hal ini buku maupun jurnal.

c. Studi Internet

Melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni dengan memilah bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini digunakan sistematika pembagian kedalam 4 Bab dengan masing-masing Bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori hukum sebagai pisau analisis dari permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang Studi Perbandingan Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Antara Kuhap Dan Ruu Kuhap.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data dari penelitian dari permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti